



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**“KETERPADUAN KEBIJAKAN DAN  
PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN  
DAERAH”**

Disampaikan Oleh:

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

pada acara

Musyawarah Perencanaan Pembangunan  
(Musrenbang)

Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 16 April 2012

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

***Bismillahirrahmanirrahim,***

*Assalamu'alaikum wr. wb.,*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Saya Hormati,

**Gubernur Provinsi Jawa Timur,**

**Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur,**

**Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,**

**Forum Pimpinan Daerah,**

**Para Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 Pemerintah**

**Daerah Provinsi Jawa Timur,**

**Para Kepala Bappeda Provinsi dan**

**Kabupaten/Kota se Jawa Timur,**

**Para Kepala Dinas Bidang PU Provinsi dan**

**Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dan**

**Para Peserta Musrenbang Provinsi Jawa Timur.**

Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan limpahan kasih sayang-Nya kita diberikan kesehatan dan kekeluasan untuk bertemu pada acara **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur** di kota yang kita cintai ini. **Musrenbang Provinsi Jawa Timur** ini sangat penting dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, karena forum ini merupakan forum koordinasi untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program-

program pembangunan, khususnya program pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan program-program pembangunan sektoral lainnya, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun dengan program-program pembangunan nasional.

Acara ini sekaligus bermanfaat untuk menselaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKP dan Renja-K/L) dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur tahun 2013, termasuk keterkaitannya dengan adanya pembiayaan dana perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Penyelarasan program-program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keterpaduan, sinergitas, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).

***Para Peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Untuk memenuhi tujuan dan sasaran Musrenbang ini serta untuk meningkatkan kemanfaatan infrastruktur PU dan permukiman yang telah dan akan dibangun, beberapa hal perlu mendapat perhatian kita semua, karena pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada tahap perencanaan, namun perlu ditindaklanjuti pada tahap pelaksanaan, tahap pemeliharaan dan pemanfaatannya.

Dalam rangka pencapaian tersebut, perlu dilakukan upaya integrasi dan sinkronisasi *potensi sumberdaya* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar rencana dan program pembangunan yang akan dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal dalam memenuhi sasaran prioritas baik nasional maupun daerah.

Berikut ini saya sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun 2013 merupakan tahun empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian PU 2010-2014 sehingga pemenuhan target rencana pembangunan lima tahun tersebut praktis terhitung sejak saat ini hanya tinggal dua tahun lagi yaitu tahun 2013 dan 2014. Seyogyanya prioritas dan fokus pembangunan ke depan diarahkan untuk mempercepat dan menajamkan pembangunan infrastruktur melalui pelaksanaan kebijakan umum pembangunan nasional yaitu: *pro growth, pro poor, pro job* dan *pro environment*, untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, penurunan pengangguran dan kemiskinan, dan juga semakin terjaganya kelestarian lingkungan.

Selain daripada itu, Rencana Strategis Kementerian PU tahun 2010-2014 yang memiliki visi: **“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”**, telah pula menetapkan target capaian 2014 dalam rangka mencapai tujuan (1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk terlaksananya pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah yang terpadu dan sinergis bagi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif

dan berkelanjutan, (2) meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum, dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi, (3) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar bidang permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (4) meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan (5) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi.

Perlu kami sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang relatif besar, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, seyogyanya menggunakan mekanisme penyusunan program infrastruktur jangka menengah yang terintegrasi dengan memperhatikan

potensi sumber daya yang ada di Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Kota agar rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat memenuhi sasaran secara nasional.

Penyusunan program dan kegiatan tahun 2013 baik untuk pusat maupun daerah juga harus mengacu pada arahan direktif Bapak Presiden, yang meliputi beberapa kebijakan khusus Pemerintah yang harus dituangkan dalam prioritas program dengan dilengkapi target yang telah ditetapkan, diantaranya : percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada **koridor ekonomi** dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan dan mengembangkan *cluster* industri serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan. Selain itu, diperlukan pula perkuatan *domestic connectivity* yaitu konektivitas intra dan inter pusat-pusat pertumbuhan, intra koridor dan keterkaitan dengan pintu perdagangan internasional (*hub*), seperti halnya pelabuhan di Tanjung Perak Kota Surabaya, pelabuhan udara Juanda serta penguatan Ketahanan pangan, melalui perluasan layanan jaringan irigasi sehingga pertumbuhan 7% produksi padi nasional per

tahun dapat tercapai, dan rencana percepatan penyediaan air minum, dalam rangka pencapaian target MDG's. Terkait dengan bidang ke-PU-an, akan dilakukan pula peningkatan dan perluasan program pro-rakyat antara lain meliputi; (a) Program Rumah Murah dan Sangat Murah, (b) Program Air Bersih untuk Rakyat, (c) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, (d) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan dan di bantaran kali.

***Bapak/Ibu Peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Permasalahan tata ruang di Indonesia saat ini memang cukup kompleks. Hal ini dapat dimengerti karena munculnya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur keterpaduan antar sektor dinilai cukup terlambat. Namun demikian kita semua perlu berupaya secara aktif untuk mewujudkan tata ruang nasional yang sehat, aman dan nyaman sehingga seluruh kepentingan sektoral dapat terakomondir dengan baik.

Pada kesempatan ini saya perlu menggarisbawahi pula mengenai pentingnya percepatan penyelesaian



Perda Penataan Ruang baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Daerah agar sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan dalam RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten. Penyelesaian RTRW ini akan memberikan kepastian bagi para pelaku pembangunan dan bagi investor untuk menanam modalnya di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur, sekaligus berfungsi sebagai basis untuk melakukan pembangunan secara tertib seperti di bidang jalan, sumber daya air, maupun prasarana permukiman. Dalam kesempatan lain, status Penetapan RTRW Provinsi Jawa Timur Sudah mendapatkan persetujuan substansi Menteri PU.

***Bapak/Ibu Peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Hal lain yang perlu saya sampaikan adalah masalah kualitas perencanaan dan proses pembangunan yang berdampak pada belum baiknya kemanfaatan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun, dimana pada akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan publik. Hal yang mengemuka adalah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur masih banyak kegiatan yang bersifat sektoral dan tidak

terpadu, bukan saja antara pusat dan daerah namun juga antar sektor di daerah, sehingga perlu dilaksanakan perencanaan dan pembangunan yang lebih sinkron dan terintegrasi. Oleh karena itu dalam tahun-tahun mendatang Pemerintah akan menggunakan format **Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kementerian PU (RPI2JM) sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan** yang mengintegrasikan Rencana Strategis Kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah maupun Renstra Kementerian dan lembaga lainnya. RPI2JM digunakan sebagai landasan untuk penyusunan program tahunan dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dunia usaha/masyarakat, termasuk optimalisasi dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan, serta kegiatan yang menggunakan anggaran DAK dan Otonomi Khusus.

Upaya yang lebih sistematis dengan instrumen RPI2JM untuk koordinasi, pelaksanaan serta integrasi dan sinkronisasi perencanaan seyogyanya dimulai dari

tahap Musrenbangda di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Musrenbangnas. Oleh karenanya saya menyambut positif acara ini sebagai upaya menuju kepada keterpaduan program dan keterpaduan rencana pembangunan yang kita susun, sehingga lebih cepat dan lebih murah untuk dimanfaatkan masyarakat.

***Bapak/Ibu Peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Selanjutnya prinsip penyusunan program/kegiatan pembangunan dalam tahun 2013 yang akan datang kami mohon agar lebih realistis untuk dilaksanakan, yaitu dengan memprioritaskan pada pekerjaan lanjutan kontrak Tahun Jamak yang sudah mengikat, penuntasan dan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang segera dapat berfungsi (*rounding up*), serta melaksanakan penanganan kegiatan operasi-pemeliharaan, rehabilitasi dan preservasi, dan perawatan setelah pembangunan selesai (pasca konstruksi) yang perlu diperhatikan sehingga dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kita yang sangat mendambakan ketersediaan infrastruktur yang handal.

Alokasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.932,58 Milliar dan pada tahun 2013 usulan dana pembangunan bidang ke-PU-an sebesar Rp. 8.286,62 Milliar yang terdiri dari pagu baseline Rp. 4.659,77 Milliar dan inisiatif baru Rp. 3.626,85 Milliar. Tentunya hal ini merupakan usulan yang masih perlu penyesuaian dengan kondisi makro ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat stabil dan kondusif di tahun 2013 yang akan datang.

Dengan semakin baiknya proses perencanaan dan pemrograman yang berbasis Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka diharapkan pada tahun mendatang tidak ada lagi bangunan infrastruktur yang tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diselesaikan karena terkendala masalah sosial dan pengadaan tanah, tidak didukung secara berkelanjutan oleh daerah, serta bertentangan dengan upaya kelestarian lingkungan.

Saya juga mengajak seluruh jajaran Daerah berkomitmen dalam mendukung tercapainya target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMN, RPJMD dan Renstra Kementerian PU tahun 2010-2014 dengan beberapa inisiatif baru untuk melaksanakan

pembangunan yang sesuai dengan arahan direktif Bapak Presiden. Marilah kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya agar hasil penyusunan program tahun 2013 dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga dalam menjalankan tugas kita selalu diberi kesehatan, rahmat dan hidayah- Nya kepada kita semua.

Akhir kata, melalui acara ini kami berharap dapat dihasilkan pemikiran dan kesepakatan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih saudara sekalian.

**Wassalamu'alaikum,warahmatullahi wabarakatuh.**

Surabaya, 16 April 2012

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**DJOKO KIRMANTO**